



## Dugaan Korupsi CCTV Monas Terus Didalami

**KEJAKSAAN** Tinggi (Kejati) DKI memerintahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat untuk mendalami penyidikan dugaan korupsi pengadaan CCTV (*closed circuit television*) di kawasan Monas yang diduga melibatkan tersangka Dario dari PT Harapan Mulya Karya, rekanan Suku Dinas (Sudin) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pemkot Jakarta Pusat.

"Kami telah memerintahkan Kejari Jakarta Pusat agar melengkapi bukti-bukti kasus dan menpedalami penyidikan, sehingga berkasnya bisa segera dilimpahkan ke pengadilan," ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI, Ida Bagus Wismantanu kepada wartawan di Jakarta, kemarin (3/8).

Ida juga menegaskan meski kasusnya sudah lama dalam proses penyidikan, namun pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukumnya hingga tuntas. "Tentu kasus ini akan diselesaikan hingga sampai di persidangan," tandas Ida Bagus.

Sementara itu, Kepala Kejari Jakarta Pusat, Hermanto juga membantah kalau pihaknya telah menghentikan kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV tersebut. Menurutnya, tim penyidikannya masih terus menelaah kasus tersebut dalam rangka proses hukum yang sedang dilakukan. "Jadi kasus ini masih dalam penyidikan," ujarnya.

Untuk diketahui, Kejati Jakarta Pusat menyelidiki proyek pengadaan CCTV Monas untuk anggaran tahun 2010 yang diduga merugikan negara Rp 1,7 miliar telah menetapkan tiga tersangka ■

Selain pihak rekanan, Kejari Jakarta Pusat juga menetapkan Kasudin Kominfo Jakarta Selatan, Yuswil Iswantara yang kala itu menjabat sebagai Kasudin Kominfo Jakarta Pusat.

Tersangka lainnya adalah Kasudin Kominfo Jakarta Pusat Ridha Bahar yang sebelumnya menjadi Ketua Pengadaan Barang dan Jasa. Ketiganya diduga terlibat dalam korupsi pengadaan CCTV senilai Rp 1,7 miliar. Versi penyidik kejaksaan ada empat alasan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan CCTV Monas itu.

Pertama, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang terindikasi *mark up*, kedua pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak. Selain itu, proyek seolah-olah telah selesai dilaksanakan sehingga seluruh pembayaran senilai Rp 1,7 miliar dibayarkan.

Padahal menurut hasil penyelidikan kejaksaan, proyek belum selesai sepenuhnya. Indikasi lain yakni penerbitan surat-surat seperti Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (PPLS), Surat Perintah Membayar (SPM), bukti pendukung dan kuitansi pembayaran proyek belum 100 persen selesai dilaksanakan. (ind)